

BUKU REKOMENDASI



Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2017



Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2017

BUKU REKOMENDASI



Panitia Kerja Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs) 2017



Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2017

Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) SDGs 2017



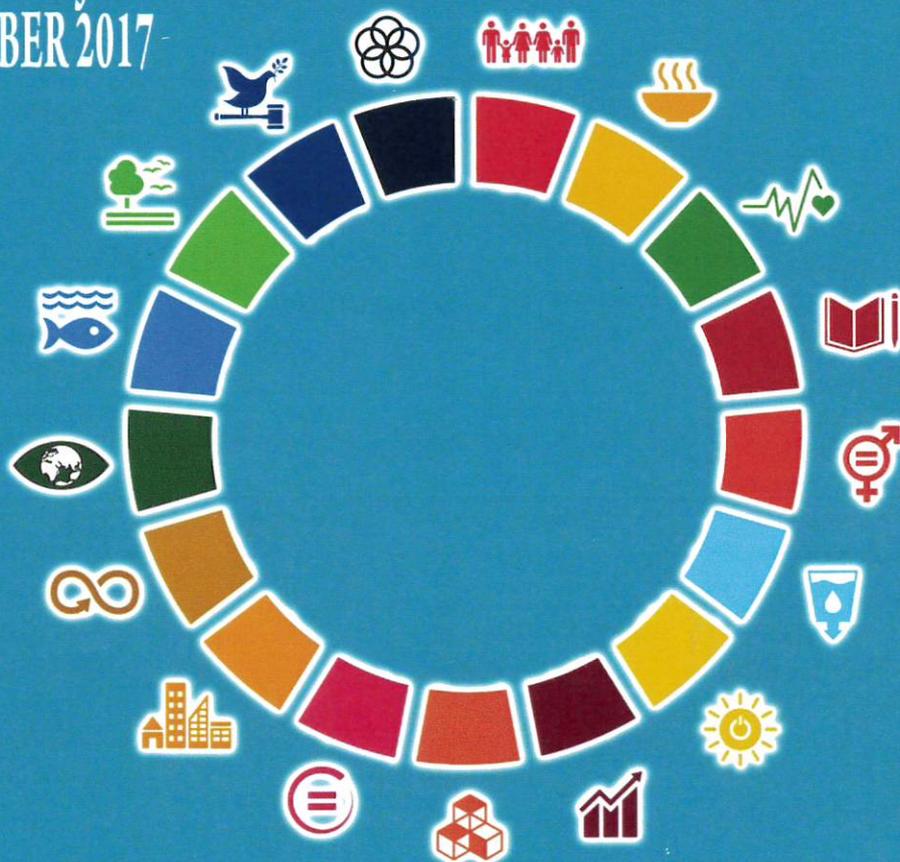
Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) SDGs 2017

- 1. Pemerintah perlu segera membentuk Tim Koordinasi Nasional SDGs sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.** Perpres tentang pelaksanaan SDGs di Indonesia telah ditandatangani sejak Juli, namun, hingga akhir tahun 2017, Tim Koordinasi Nasional SDGs belum beroperasi secara maksimal. Pemerintah melalui Perpres tersebut telah membentuk Dewan Pengarah yang diketuai Presiden, namun, struktur Tim Koordinasi Nasional SDGs lainnya, yang terdiri dari Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Tim Pakar belum terbentuk. Pembentuk dan penetapan keanggotaan pada masing-masing struktur Tim Koordinasi Nasional SDGs tersebut diperlukan untuk memaksimalkan pencapaian dan pelaksanaan SDGs di pusat dan di daerah.
- 2. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Pelaksanaan SDGs 2017-2019 harus dilakukan secara inklusif dan terbuka. Selain itu, RAN tentang Pelaksanaan SDGs perlu disajikan dalam bahasa yang mudah dimengerti, sederhana dan bersifat *actionable* (dapat dilaksanakan).** Pasal 20 Perpres SDGs memandatkan bahwa RAN tentang SDGs harus sudah ditetapkan enam bulan setelah ditandatanganinya Perpres terkait. Dengan demikian, pada Januari 2018, RAN SDGs sudah harus final. Pemerintah telah menyusun draf RAN SDGs 2017-2019 dan tengah menampung masukan, usulan perbaikan serta komentar terkait draf tersebut. Kendati proses terkesan bersifat inklusif, tetapi, yang terjadi belum sepenuhnya terbuka. Publik tidak mendapatkan akses memadai untuk mengetahui adanya draf RAN. Draft RAN hanya terinformasikan melalui situs pemerintah sementara upaya untuk meningkatkan *public awareness* akan adanya draf RAN tersebut belum terlihat maksimal. Panja juga mendorong agar bentuk penyajian draf RAN lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh publik.

- 3. Penguatan kerja sama dan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat signifikan dalam memastikan kesuksesan pencapaian pelaksanaan SDGs.** Pelaksanaan SDGs dalam konteks nasional memerlukan keberhasilan pencapaian pelaksanaan di level daerah. Pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam proses pelaksanaan SDGs dengan mekanisme kerja sama dan sinergi yang tepat. Pemerintah pusat perlu lebih gencar berkonsultasi dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan SDGs di daerah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan memastikan proses perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2017-2019 bersifat inklusif dan terbuka dan ditetapkan tidak lebih dari 12 bulan sejak Perpres SDGs ditandatangani (Pasal 20). RAD juga perlu memperhatikan aspirasi lokal dan kepentingan pembangunan daerah.
- 4. Pemerintah perlu menggali lebih jauh peluang pembiayaan pelaksanaan SDGs dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan mengeksplorasi inovasi-inovasi pendanaan lebih lanjut.** Pelaksanaan SDGs membutuhkan dorongan peningkatan sumber daya yang dimiliki untuk memastikan pencapaiannya. Namun demikian, sejauh ini belum terlihat upaya pemerintah untuk mengoptimalisasi sumber daya pendanaan, baik dari pemerintah, maupun dari non-pemerintah, untuk melaksanakan target-target pembangunan yang sejalan dengan SDGs, selain yang telah termaktub dalam mandat konstitusi maupun UU (*mandatory spending*). Inovasi-inovasi pembiayaan diperlukan, salah satunya melalui filantropi. Pemerintah perlu menggalang kerja sama yang lebih luas dan erat dengan Lembaga Perhimpunan Filantropi, untuk memastikan potensi sumber daya filantropi dapat terarahkan untuk melaksanakan SDGs. Potensi pendanaan dari *corporate social responsibility* (CSR), hingga lembaga keuangan, maupun di pasar modal sangatlah besar. Pemerintah perlu memaksimalkan upaya menggali peluang dan memberi insentif untuk mengelola sumber daya yang dihasilkan dari optimalisasi inovasi yang ada.

5. **Pemerintah perlu memaksimalkan kolaborasi dengan lembaga riset baik nasional maupun internasional, swasta maupun perguruan tinggi.** Kolaborasi dengan lembaga riset adalah penting untuk memaksimalkan ketersediaan data dan fakta yang memadai untuk mendukung terwujudnya proses pengambilan kebijakan yang memadai, tepat guna dan komprehensif. Kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan para pemangku kepentingan dalam menyusun metadata indikator patut diapresiasi. Kendati demikian, proses kolaborasi tersebut perlu dilanjutkan di level daerah, mengingat tantangan pembangunan masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda-beda yang akan memberikan sumbangan pencapaian pelaksanaan SDGs secara berbeda pula.

LAPORAN DELEGASI BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (BKSAP DPR RI)
UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)
DALAM RANGKA KUNJUNGAN TEKNIS KE KONFEDERASI SWISS
17 S.D 23 NOVEMBER 2017



**LAPORAN DELEGASI BKSAP DPR RI
UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)
DALAM RANGKA KUNJUNGAN TEKNIS KE KONFEDERASI SWISS
17 S.D 23 NOVEMBER 2017**

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 November 2017 Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) melakukan kunjungan teknis ke Konfederasi Swiss.

Penugasan Delegasi BKSAP DPR RI untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) didasarkan kepada Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 231/PIMPI/I/2017-2018 tanggal 2 November 2017, dengan susunan dan nama Delegasi BKSAP DPR RI untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagai berikut :

NO	NAMA/NO. ANGGOTA	FRAKSI	KETERANGAN
1.	H. Syaifullah Tamliha, SPi., MS. No. Anggota : A-538	Partai Persatuan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Delegasi • Wakil Ketua BKSAP DPR RI • Anggota Komisi I
2.	Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc. No. Anggota : A-143	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Delegasi • Anggota BKSAP • Anggota Komisi III
3.	Dr. H. Sareh Wiyono M, SH, MH. No. Anggota : A-371	Partai Gerakan Indonesia Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Delegasi • Anggota BKSAP • Anggota Komisi II
4.	Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo No. Anggota : A-356	Partai Gerakan Indonesia Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Delegasi • Anggota BKSAP • Anggota Komisi VIII
5.	Heri Gunawan, SE. No. Anggota : A-346	Partai Gerakan Indonesia Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Delegasi • Anggota BKSAP • Anggota Komisi XI
6.	Hj. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi. No. Anggota : A-472	Partai Amanat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Delegasi • Anggota BKSAP • Anggota Komisi VIII
7.	Dra. Hj. Siti Masrifah, MA. No. Anggota : A-77	Partai Kebangkitan Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Delegasi • Anggota BKSAP • Anggota Komisi IX
8.	M. Arief Suditomo, SH, MA. No. Anggota : A-550	Partai Hati Nurani Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Delegasi • Anggota BKSAP • Anggota Komisi I

Dalam kunjungan teknis tersebut Delegasi BKSAP DPR RI untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) didampingi oleh Pejabat KBRI Swiss dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

B. MISI DELEGASI

1. Untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada masalah-masalah nasional dan internasional terutama dalam memperkuat kemitraan global dengan mengimplementasikan *Bali Declaration* hasil dari konferensi *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (SDGs)* tanggal 6-7 September 2017 di Bali, Indonesia;
2. Melakukan diskusi mendalam tentang kebijakan-kebijakan spesifik terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan antara Delegasi BKSAP DPR RI untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Pemerintah, Parlemen, stakeholder, LSM di Swiss.
3. Misi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi langsung mengenai masalah kelembagaan dan dukungan parlemen dan keterlibatan untuk isu-isu pembangunan berkelanjutan. Dan juga mengumpulkan informasi mengenai kemitraan internasional untuk proyek pembangunan berkelanjutan serta praktik terbaik untuk mendukung pelaksanaan SDG.

C. KEGIATAN DALAM KUNJUNGAN TEKNIS

I. Pertemuan dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss, tanggal 19 November 2017

Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss, Linggawaty Hakim menyambut kedatangan rombongan Delegasi BKSAP DPR RI untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dipimpin Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc. di Wisma KBRI Bern, Swiss. Linggawaty Hakim menyampaikan kepada Delegasi DPR RI bahwa kita perlu mendorong agar saluran-saluran diplomasi dibuka seluas mungkin, terutama untuk anggota parlemen mengingat parlemen mempunyai fungsi yang menentukan untuk membantu pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri.

Terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Linggawaty Hakim mengakui bahwa dirinya harus belajar banyak kepada Panitia Kerja BKSAP DPR RI untuk SDGs yang diketuai oleh Dr. Nurhayati Ali Assegaf yang sejak era MDGs terus berkecimpung memastikan semua tujuan tercapai dalam pelaksanaannya di Indonesia.

Sementara itu, Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc. yang sebagai Pimpinan Delegasi BKSAP DPR RI untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengapresiasi sambutan Duta Besar. Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc. mengatakan bahwa salah satu fungsi DPR RI, sesuai dengan amanat UU MD3, adalah menjalankan peran diplomasi membantu Pemerintah RI dalam percaturan politik global. BKSAP adalah alat kelengkapan dewan yang dibentuk untuk menjalankan peran diplomasi parlemen.

Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc. melanjutkan bahwa mengingat pentingnya peran parlemen dalam implementasi SDGs, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang terdiri dari lintas komisi dan fraksi. Panja dibentuk demi melanjutkan tugas-tugas yang ada di dalam agenda pembangunan sebelumnya (*Millenium Development Goals*).

Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc. menginformasikan kepada Dubes RI bahwa Panja BKSAP DPR RI untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memiliki dua tujuan, yakni: (1) untuk membentuk keterlibatan awal parlemen dalam isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta; (2) untuk membangun kemitraan dengan mitra domestik dan juga mitra internasional untuk mensukseskan pelaksanaan SDGs.

Lebih lanjut, Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc. mengutarakan alasan Delegasi DPR RI mengadakan kunjungan teknis ke Bern, adalah dalam usaha untuk memaksimalkan peran parlemen, Panja SDGs mencari jalan untuk lebih memperdalam dukungan parlemen dalam pengarusutamaan SDGs dalam konteks pembangunan nasional. Panja saat ini sedang bekerja untuk mempelajari praktik cerdas negara-negara di seluruh dunia yang mempromosikan kebijakan pembangunan manusia dalam konteks SDGs. Panja SDGs juga mengeksplorasi kesempatan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dari kebijakan khusus di suatu negara yang memiliki inisiatif dalam upaya pengembangan implementasi SDGs.

Konfederasi Swiss dipilih sebagai negara tujuan kunjungan teknis dikarenakan Konfederasi Swiss menempati urutan ke 8 dari 157 negara pada indeks SDG 2017 yang dikembangkan oleh *Sustainable Development Solutions Network (SDSN)* dan Bertelsmann Stiftung. Swiss berada di urutan ke-5 dari 163 negara dan terdaftar sebagai negara baik kedua dalam hal kemakmuran dan persamaan.

Perkembangan manusia di Swiss dikategorikan sebagai pengembangan manusia yang sangat tinggi. Ini adalah perkembangan manusia terbaik kedua di dunia dengan Indeks Pembangunan Manusia 0,939. Kepada Dubes RI, Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc. menyampaikan bahwa DPR RI telah sukses menyelenggarakan *World Parliamentary Forum on Sustainable*

Development (SDGs) tanggal 6-7 September 2017 di Bali, Indonesia dengan menghasilkan keputusan bersama dalam *Bali Declaration*.



Pertemuan ramah tamah dan makan malam Delegasi DPR RI dengan Duta Besar Republik Indonesia, Lingawaty Hakim



Penyerahan Cendera Mata Delegasi DPR RI dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Konfederasi Swiss, Lingawaty Hakim

II. Pertemuan Delegasi DPR RI dengan Kementerian Perekonomian SECO (*State Secretariat for Economic Affairs*) Swiss, tanggal 20 November 2017

State Secretariat for Economic Affairs (SECO) adalah badan federal untuk isu-isu utama terkait kebijakan ekonomi. Tujuannya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menempatkan kebijakan dan pengaturan kondisi ekonomi yang dibutuhkan. SECO berada di bawah naungan koordinasi *Federal Departemen of Economic Affairs, Education and Research* yang dipimpin oleh anggota Konsil Federasi, Johann N Schneider-Ammann.

Di level domestik, SECO berperan sebagai penghubung antara bisnis, mitra sosial dan pemerintah. Ia mendukung pembangunan ekonomi yang terstruktur dan kewilayahan dan memastikan perlindungan terhadap pekerja. Melalui kebijakan buruh, SECO berkontribusi dalam pencegahan dan menangani pengangguran, serta menjaga perdamaian sosial.

SECO juga membantu memastikan akses kepada pasar untuk seluruh produk, jasa dan investasi Swiss. Dalam hal kebijakan perdagangan internasional, SECO aktif dalam formulasi kebijakan/peraturan yang efisien, adil dan transparan untuk ekonomi dunia. SECO juga terlibat dalam upaya pengurangan kemiskinan dalam bentuk bantuan pembangunan ekonomi. SECO juga menaungi Layanan Akreditasi Swiss untuk semua proses akreditasi di bidang yang diatur dan tidak diatur.

SECO menjadi salah satu institusi bersama Departemen Luar Negeri Swiss menjalankan kerja sama internasional.

SECO dan SDGs

Divisi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan SECO berkontribusi untuk mencapai tujuan-tujuan strategis kebijakan ekonomi luar negeri Swiss. SECO saat ini melaksanakan sekitar 500 program dan proyek yang membantu integrasi negara mitra di Selatan dan Timur ke ekonomi global dan mencapai kemajuan yang berarti.

Fokus SECO pada kerja sama ini adalah 1) Memperkuat kebijakan ekonomi dan finansial, 2) Ekspansi infrastruktur dan utilitas perkotaan, 3) Dukungan untuk sektor swasta dan kewirausahaan, 4) Pemajuan perdagangan berkelanjutan, 5) Membina pertumbuhan ramah iklim.

SECO mendukung negara berkembang yang telah maju di Afrika, Asia dan Amerika Latin dan negara transisi di Eropa Timur dan Asia Tengah dalam menghadapi isu kemiskinan dan pembangunan. Kerja sama tersebut meliputi langkah global dan juga upaya-upaya regional dan bilateral (*country-specific*). **Indonesia** menjadi salah satu negara prioritas bersama Kolombia, Mesir, Ghana, Peru, Afrika Selatan, Tunisia dan Vietnam.

SECO di Indonesia

Beberapa program SECO di Indonesia, bekerjasama dengan organisasi internasional maupun Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

Adapun sejumlah program SECO di Indonesia yakni:

1. *Better Work (Phase III)*

Merupakan kemitraan bersama Organisasi Perburuhan Internasional dan *International Finance Corporation* untuk meningkatkan kondisi kerja dan penghormatan atas hak buruh di industri garmen, dan juga produktivitas dan daya saing bisnis pakaian. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar perburuhan nasional dan internasional, memfasilitasi praktik pembelian yang lebih baik dan bekerja dalam tataran kebijakan untuk secara keseluruhan meningkatkan kondisi kerja dalam rantai pasokan global. Indonesia dan Vietnam adalah negara implementasi program ini. (1 Juli 2017 – 31 Oktober 2021 / CHF 12 Juta).

2. *Indonesia Financial Sector Strengthening Program (Phase II)*.

Program bertujuan untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan dan memajukan pengembangan sektor keuangan yang ramah dan inklusif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan kerja di Indonesia. (1 Oktober 2017 – 30 September 2021 / CHF 6 juta).

3. *Multi-country climate investment program*

Program ini mendukung masukan untuk reformasi iklim investasi di lebih dari 20 negara SECO. Pelaksana proyek adalah *International Finance Corporation*. Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang menjadi sasaran program ini. (1 Januari 2017 – 31 Desember 2024 / CHF 44,8 juta).

4. *Indonesia Bus Rapid Transit Development Project*

Program ini dikelola oleh *the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)* membantu perkotaan Indonesia dalam mengembangkan koridor transit bus cepat sebagai tulang punggung sistem mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Ini meliputi bantuan teknis dan penguatan kapasitas bagi kota dan untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan transportasi publik massif berbasis bus di kota-kota sedang di Indonesia.

JALANNYA PERTEMUAN

Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc., sebagai Pimpinan Delegasi memperkenalkan Delegasi BKSAP DPR RI untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kepada Delegasi *State Secretariat for Economic Affairs (SECO)* yang dipimpin Raymund Furrer, *Head of Economic Cooperation and Development SECO*, dan menjelaskan kepada SECO bahwa Panja BKSAP DPR RI untuk Pembangunan terdiri atas Anggota DPR RI dari lintas fraksi dan komisi. DPR RI berkomitmen menjalin kerja sama dan kemitraan dengan

pemerintah, pelaku bisnis, dan CSO untuk mensukseskan implementasi SDGs di lapangan.

Untuk memaksimalkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Panja BKSAP DPR RI untuk SDGs membuat sinergi dengan para pemangku kepentingan dengan secara reguler mengadakan diskusi, dan dengar pendapat dengan pemerintah dan NGO. Di tingkat domestik, saat ini Panja BKSAP DPR RI untuk SDGs terus mengembangkan kerjasama yang solid dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappennas dan Kementerian Luar Negeri yang merupakan penjurur (*focal point*) dari pemerintah Indonesia tentang isu-isu SDGs.

Panja secara teratur menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah selama proses SDGs. Selain itu, Panja BKSAP DPR RI untuk SDGs juga aktif mengadakan dialog dengan *The International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)* sebagai representasi CSO. Panja BKSAP DPR RI untuk SDGs meyakini kerja sama antara parlemen-pemerintah-CSO akan menciptakan kesempatan luas untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik cerdas di antara ketiganya.



Pertemuan Delegasi DPR RI dengan Delegasi DPR RI dengan Perwakilan Kementerian Perekonomian *SECO (State Secretariat for Economic Affairs)* di Bern, Swiss

Di tataran internasional, anggota Panja BKSAP DPR RI untuk SDGs terlibat dalam perumusan SDGs di berbagai forum internasional termasuk di dalamnya *Inter-Parliamentary Union (IPU)* atau pun organisasi parlemen lainnya.

Untuk menindaklanjuti *Bali Declaration* hasil dari konferensi *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (SDGs)* pada tanggal 6 s.d. 7 September 2017 di Bali, Indonesia, Panja BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melakukan misi lapangan untuk mengumpulkan informasi ke negara-negara di mana parlemen berhasil menempatkan usaha dalam pekerjaan legislatif terhadap implementasi SDGs. Untuk menentukan subyek penelitian, Panja mengambil fokus khusus pada kesejahteraan dan isu-isu pembangunan manusia, Swiss dipilih sebagai negara kunjungan karena komitmen global bagi bantuan pembangunan internasional yang dikukuhkan lewat undang-undang *International Development (Official Development Assistance Target) Act 2015*.

Ketua Delegasi *State Secretariat for Economic Affairs (SECO)*, yang dipimpin Raymund Furrer mengapresiasi kunjungan kerja Panitia Kerja BKSAP DPR RI untuk Pembangunan Berkelanjutan ke SECO. Ia menyebut parlemen memiliki peran penting dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di lapangan, bersama pemerintah, parlemen adalah pemangku kepentingan yang dapat menginisiasi sejumlah aturan dan regulasi lintas sektor demi tercapainya tujuan dan indikator yang terdapat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SECO berharap dari diskusi ini dapat menghasilkan Jawaban dan keputusan yang baik.

Rahayu Saraswati Djojhadikusumo menyatakan bahwa Swiss merupakan salah satu negara sukses dalam pencapaian SDGs, berkaitan dengan itu, bagaimana peran SECO dalam upaya mendorong terwujudnya ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Swiss ?, dan Apa saja kebijakan-kebijakan yang muncul dari Kementerian Perekonomian *SECO* untuk mewujudkan hal tersebut?



Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sedang menyampaikan pertanyaan kepada Kementerian Perekonomian SECO

Heri Gunawan juga ingin berbagi pengalaman dan ingin mengetahui Bagaimana SECO menyesuaikan perkembangan program dan proyek yang ada dengan Agenda 2030. Hal ini penting mengingat kami memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa segala manfaat dari pembangunan dan juga kerja sama pembangunan internasional dapat terwujud secara maksimal dan efektif, efisien, serta bagaimana kerjasama SECO dengan Indonesia.



Heri Gunawan menyampaikan pertanyaan kepada Kementerian Perekonomian SECO

SECO menyadari sepenuhnya bahwa pengawasan yang efektif terhadap kebijakan pemerintah terhadap implementasi SDGs sangat penting untuk memastikan bahwa ada momentum dan keterbukaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030 mendatang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pentingnya menjalankan amanat dokumen SDGs yang dikeluarkan PBB untuk melakukan tinjauan kemajuan reguler dan inklusif (*regular and inclusive reviews of progress*) di tingkat nasional dan sub-nasional yang dipimpin oleh negara. Tinjauan semacam itu harus mengacu pada kontribusi masyarakat adat, masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, sesuai dengan kondisi, kebijakan dan prioritas nasional.

SECO memantau kinerja pembangunan berkelanjutan dalam negeri, yang akan menjadi bagian besar tanggapan Swiss terhadap SDGs. Untuk menilai setiap kesenjangan potensial yang menjadi tanggung jawab departemen mereka. Ini juga akan memungkinkan mereka mendorong indikator nasional ambisius di berbagai wilayah dan meminta pemerintah untuk menjelaskan di mana saja hal itu mungkin akan gagal dalam 15 tahun ke depan. SECO mendorong semua komite untuk: (1) mendorong indikator nasional yang ambisius terhadap SDGs; (2) Memantau kemajuan departemen terhadap indikator ini, setelah dirumuskan, dan menggunakan data yang dihasilkan oleh Kantor Statistik Nasional (ONS) setiap tahun untuk meminta departemen untuk memperhitungkan, dan menjelaskan kinerjanya.



Kementerian Perekonomian SECO sedang memberikan penjelasan kepada Delegasi BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tantangan Pengembangan dan respons SECO dalam kerjasama dengan Indonesia

Tujuan keseluruhan program kerjasama dan pengembangan ekonomi Swiss adalah untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia yang sejahtera. Tujuan utamanya adalah mencapai definisi dan pemahaman pemerintah Indonesia tentang prioritas sebagaimana didefinisikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN 2015-2019)

Tujuan utamanya lebih jauh ditentukan di sepanjang dua tujuan sub strategis yang ditujukan untuk lingkup publik dan swasta, sambil bermaksud untuk memahami elemen penting kualitas dan efisiensi layanan yang disampaikan, dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan bijaksana, serta menempatkan pekerjaan yang tinggi pada agenda pembangunan.

Kontribusi terhadap tujuan pembangunan Negara Indonesia

Langkah-langkah yang diusulkan diharapkan dapat berkontribusi pada tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia mengenai investasi di sektor bisnis, yaitu tuntutan untuk difasilitasi melalui penegakan hukum yang pasti, sistem informasi yang lebih baik, prosedur yang disederhanakan, penyediaan tenaga kerja yang terlatih dan pengembangan zona ekonomi khusus

Usulan tindakan SECO

- * SECO bermaksud untuk terus terlibat dalam reformasi kebijakan ekonomi dan dalam memperbaiki kebijakan keuangan, yang akan menghasilkan mobilisasi sumber daya yang lebih transparan dan efisien dan pengelolaan keuangan publik yang lebih penting lagi.
- * Kriteria perencanaan dan mekanisme finansiasi yang ditingkatkan dan langkah inovatif yang selektif untuk mempromosikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di kota-kota di Indonesia akan menjadi inti kegiatan SECO di sektor ini.
- * SECO bermaksud untuk membantu utilitas publik dalam meningkatkan penawaran layanan publik yang andal dan terjangkau melalui peningkatan kapasitas serta dukungan teknis dan finansial.
- * Penyertaan aspek yang Berkelanjutan dan Iklim yang kompatibel, sehingga dapat memperbaiki reformasi energi dan langkah-langkah investasi dan untuk meningkatkan energi secara efisien dan pasokan dengan mempromosikan energi terbarukan, akan menjadi jantung aktivitas SECO di sektor ini.
- * Sebagai prioritas kedua, SECO bermaksud memberikan kontribusi untuk memperbaiki peraturan dan pengawasan sektor keuangan, sehingga dapat mendorong pasar keuangan yang stabil, beragam dan kompetitif dan memperkuat sistem keuangan.

Dengan ukuran yang diusulkan ini, SECO bertujuan untuk berkontribusi pada reformasi sektor publik di Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2015-2019). Ini secara khusus akan mendukung pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan publiknya, yang bertujuan untuk menciptakan ruang fiskal melalui pengumpulan pendapatan dan reformasi subsidi energi untuk memungkinkan investasi yang lebih tinggi dalam program infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Ini juga akan berkontribusi pada optimalisasi peran sektor jasa keuangan nasional yang berkontribusi, stabil dan inklusif, sejalan dengan rencana induk Sektor Finansial Indonesia 2015-2019.

Akhirnya, ini akan membantu pemerintah dalam memberikan infrastruktur yang lebih baik dan energi yang lebih dapat dipercaya dan berkelanjutan, untuk memungkinkan kondisi kehidupan yang layak dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

SECO semakin memberikan impuls yang ditargetkan untuk memobilisasi sumber daya. Yang relatif sederhana namun sangat spesifik. Kontribusi Swiss dapat menempuh jalan panjang misalnya untuk memanfaatkan dampak ODA Swiss, SECO mendukung Indonesia dalam mengembangkan kerangka kerja yang mendorong mobilisasi sumber daya dalam negeri dan kewiraswastaan swasta. Demikian pula pendekatan program dan proyek yang inovatif serta mekanisme pembiayaan inovatif digunakan secara efektif untuk merangsang bentuk kolaborasi baru dan meningkatkan efektivitas

Kemitraan dan dialog diperlukan untuk mempromosikan reformasi dan juga untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan. Dialog ini melibatkan pemain di beberapa tingkatan yang dapat memberikan kontribusi pada solusi koheren dan sinergis terhadap tantangan pembangunan, pejabat swasta dan masyarakat madani serta lembaga donor dan multilateral lainnya. SECO menyeimbangkan kerjasama bilateral dan kerjasama dengan mitra multilateral dan telah menetapkan panduan untuk membantu menerapkan prinsip-prinsip penyalarsan, harmonisasi, dan akuntabilitas dan bila sesuai, penggunaan sistem nasional.

Strategi Negara akan dipantau setiap tahun untuk tujuan berikut:

- * *Steering* : Data dan informasi untuk pembuatan keputusan berbasis bukti
- * *Risk Mitigation* : Identifikasi risiko dan tindakan mitigasi yang relevan
- * *Learning* : Identifikasi faktor keberhasilan dan kegagalan, tantangan, kesenjangan dan praktik yang baik
- * *Accountability*: Data dan informasi untuk akuntabilitas terhadap kantor pusat SECO, pemerintah Swiss, masyarakat Swiss, dan negara mitra

Strategi Negara sejalan dengan tujuan dan strategi pembangunan Indonesia dan juga dengan SDGs. Oleh karena itu pemantauan tahunan memastikan portofolio SECO memang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Indonesia.

Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari inisiatif regional dan global yang didanai SECO.



Penyerahan Cendera mata Delegasi DPR RI dengan Perwakilan Kementerian Perekonomian SECO (State Secretariat for Economic Affairs) di Bern, Swiss

III. Pertemuan Delegasi DPR RI dengan Michael Gerber (*Swiss Special Envoy for Global Sustainable Development*/Utusan Khusus SDGs Swiss), tanggal 21 November 2017

Tentang Special Envoy dan SDGs

Pada pertengahan 2012, Konsil Federal menunjuk Michael Gerber sebagai Duta Besar dan Utusan Khusus untuk mewakili Konfederasi Swiss dalam negosiasi internasional dan badan-badan internasional terkait Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Michael Gerber sebelumnya mengepalai Divisi Kebijakan dan Analisis dalam *Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)* dan bertanggungjawab atas program pembangunan Swiss di berbagai negara.

Dalam proses pembahasan Agenda 2030, Swiss sangat berkomitmen sejak awal untuk agenda global tersebut. Swiss aktif terlibat dalam menyusun 17 SDGs dan mekanisme tindak lanjut dan *review progress*. Salah satu perhatian Swiss adalah bahwa tujuan-tujuan baru harus mencerminkan

keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan—aspek terkait pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan bagaimana tujuan yang berbeda berinteraksi dengan lainnya. Pada negosiasi, Swiss bekerja ekstra terutama untuk memasukkan tujuan individu terkait kesehatan, kesetaraan gender, air, perdamaian dan masyarakat yang inklusif. Swiss juga vokal dalam dukungannya untuk aspek seperti konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) dan peran migrasi dalam pembangunan berkelanjutan. Isu-isu ini perlu untuk masuk dalam Agenda 2030.

Dalam mempersiapkan Agenda 2030, Swiss telah menggelar proses perumusan posisi nasional pada kurun waktu 2012-2015. Satuan Tugas dibentuk pada 2012 untuk menyusun posisi nasional dalam negosiasi internasional terkait SDGs. Pada 2014 Swiss mengadopsi prioritas yang akan diperjuangkan dalam pembahasan SDGs. Politisi dan pemangku kepentingan lainnya seperti bisnis dan masyarakat sipil terlibat dalam even publik untuk proses perumusan SDGs pada 2015.

Swiss mendorong isu tematik sebagai berikut dalam pembahasan SDGs:

1. Memberantas kemiskinan ekstrem,
2. Keamanan pangan dan nutrisi untuk semua melalui sistem agri-food berkelanjutan,
3. Dunia yang aman air,
4. Memastikan akses universal atas energi berkelanjutan,
5. Memastikan pendidikan yang berkeadilan, inklusif, berkualitas, dan pembelajaran seumur hidup untuk semua,
6. Memaksimalkan kesehatan untuk semua di semua tingkatan hidup,
7. Pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua, pertumbuhan berkelanjutan, dan ekonomi hijau,
8. Konsumsi dan produksi berkelanjutan,
9. Tata kelola—mencapai institusi yang lebih terbuka, inklusif dan akuntabel,
10. Kesetaraan gender, hak perempuan, dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan,
11. Perdamaian berkelanjutan dan masyarakat inklusif,
12. Pengurangan risiko bencana,
13. Dinamika populasi,
14. Biodiversitas,
15. Perkotaan yang berkelanjutan/infrastruktur,
16. Perubahan iklim.

JALANNYA PERTEMUAN

Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc., sebagai Pimpinan Delegasi memperkenalkan Delegasi BKSAP DPR RI untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kepada Utusan Khusus SDGs yang mewakili Konfederasi Swiss yang dipimpin Michael Gerber, dan menjelaskan kepada Special Envoy bahwa Panja BKSAP DPR RI untuk SDGs dibentuk untuk melanjutkan tugas-tugas Panja BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Milenium periode yang lalu. Panja BKSAP DPR RI untuk SDGs terdiri atas anggota DPR RI dari lintas fraksi dan komisi. DPR RI berkomitmen menjalin kerja sama dan kemitraan dengan pemerintah, pelaku bisnis, dan CSO untuk mensukseskan implementasi SDGs di lapangan.

Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc., lebih lanjut menyatakan bahwa kunjungan Delegasi BKSAP DPR RI kali ini ke Swiss merupakan sebuah kunjungan khusus untuk mendalami ragam isu terkait SDGs yang ada di tataran nasional dan internasional Swiss. Kami memandang Swiss sebagai negara yang memiliki peran krusial dalam mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan di level global. Sebagai negara dengan kategori pembangunan manusia sangat tinggi (*very high human development*), Swiss menjadi satu negara tujuan kami untuk berdiskusi. Plus, reputasi Swiss sebagai negara yang netral dan mendambakan perdamaian dan masyarakat yang inklusif semakin mendorong kami untuk menyerap perspektif dan pandangan dari pemangku kepentingan di Swiss mengenai masa depan dunia, bumi kita.

Indonesia juga telah mengambil peran penting dalam *High Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda* dengan menempatkan prinsip *leave no one behind* sebagai tulang punggung Agenda 2030.

Di level internasional, kami berperan sebagai *focal point* diplomasi parlemen terkait SDGs. Kami menyerap aspirasi, mengumpulkan beragam praktik cerdas, mendengar dari beragam konferensi dan berbagi pengetahuan terkait SDGs. Dalam kaitan itulah kunjungan kami untuk mengetahui lebih dalam posisi Swiss dalam percaturan global negosiasi Agenda 2030.

Untuk mendalami perspektif Swiss tentang bagaimana melihat aspek pembangunan berkelanjutan dan rentetan agenda-agenda global lainnya seperti Perubahan Iklim, Pembiayaan Pembangunan, *Disaster Risk Reduction* (DRR), *Global Compact Refugee and Migrants* sebagai satu agenda berkelanjutan yang muaranya melekat pada Agenda 2030.

Michael Gerber, *Swiss Special Envoy for Global Sustainable Development* (Utusan Khusus SDGs Swiss) mengapresiasi kunjungan Delegasi BKSAP DPR RI untuk SDGs. Michael Gerber juga menyatakan adalah sangat krusial pula untuk melihat secara mendalam dan eksploratif bagaimana Swiss menempatkan dirinya sebagai negara dengan ekonomi yang kuat di Eropa dalam berkontribusi terhadap pencapaian SDGs secara global. Kami berharap pada kesempatan ini diskusi-diskusi menarik akan terjadi dan semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari pertemuan ini.



Pertemuan Delegasi BKSAP DPR RI untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Michael Gerber, *Swiss Special Envoy for Global Sustainable Development* (Utusan Khusus SDGs Swiss) di Bern, Swiss

Michael Gerber mengapresiasi DPR RI yang mempunyai Panja SDGs yang menjadi penjuror parlemen dalam membantu dan mengawasi pemerintah dalam implementasi SDGs di lapangan. Menurut Michael Gerber, langkah Parlemen Indonesia membentuk Panja SDGs adalah langkah maju dalam menjalankan salah satu prinsip dalam SDGs yakni *no one left behind*.

Ada banyak pergerakan di tingkat internasional. Lebih dari 65 negara, termasuk Swiss, telah menyerahkan laporan mereka ke PBB yang merinci tindakan yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan dalam agenda tersebut. Solusi praktis dikembangkan di berbagai sektor, dan kemitraan baru sedang diciptakan. Dan momentum politik nampaknya sekuat sebelumnya. Ada juga tanggapan positif terhadap 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di sektor swasta, masyarakat sipil dan komunitas ilmiah, dan aktor non-negara pada umumnya semakin dimobilisasi.

Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc. ingin mengetahui lebih dalam apa isu utama yang menjadi value dan sangat perlu diperjuangkan dalam Agenda 2030, dan Bagaimana proses negosiasi perumusan Agenda 2030 di Swiss dengan membandingkan secara internasional?



Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc., menyampaikan pertanyaan kepada Michael Gerber, Swiss Special Envoy for Global Sustainable Development (Utusan Khusus SDGs Swiss) - di Bern, Swiss

Michael Gerber menyatakan, Seperti yang diharapkan, situasi global belum banyak membaik sejak Agenda 2030 diadopsi dua tahun lalu. Tindakan mendesak masih diperlukan di berbagai bidang, seperti mengurangi ketidaksetaraan, kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesetaraan gender, dan penggunaan sumber daya alam. Selain itu, konflik politik di berbagai belahan dunia menghambat pembangunan berkelanjutan. Pakar terkemuka terus memperingatkan kita tentang betapa mendesaknya mengambil tindakan melawan perubahan iklim. Di sisi lain, pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa Anda memerlukan beberapa tahun sebelum Anda mulai melihat hasil dari penerapan norma dan sasaran global. Jadi, mengingat meningkatnya mobilisasi di sekitar SDGs, kita tetap bisa tetap optimis.

Seperti sebelumnya, Swiss adalah salah satu negara paling progresif dalam hal pembangunan berkelanjutan. Swiss telah mempertahankan peran aktif yang dimainkannya selama negosiasi Agenda 2030 (2013-15) dan telah memantapkan dirinya secara global sebagai salah satu pelopor dalam pelaksanaannya. Sejak mengadopsi Agenda 2030, pemerintah Swiss telah

meluangkan waktu untuk meninjau dan merencanakan pelaksanaan dengan hati-hati. Dalam hal ini, Dewan Federal akan diminta untuk membuat beberapa keputusan penting di musim semi 2018.

Dr. H. Sareh Wiyono M, SH, MH. Ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kontribusi Swiss untuk pencapaian SDGs 2030, dan tindakan-tindakan apa yang dilakukan untuk pencapaian tersebut?



Dr. H. Sareh Wiyono, SH, MH., menyampaikan pertanyaan kepada Michael Gerber, *Swiss Special Envoy for Global Sustainable Development* (Utusan Khusus SDGs Swiss)

Michael Gerber menyatakan, anda tidak bisa membicarakannya tanpa yang lain. Inti dari masalah ini adalah mengkoordinasikan semua kontribusi Swiss untuk mencapai SDG - baik secara nasional maupun internasional - secara koheren. Sebenarnya, Agenda 2030 pada prinsipnya tidak ditujukan untuk bidang kerjasama pembangunan. Hal ini berlaku secara universal, yang berarti semua negara diwajibkan untuk melaksanakan agenda tersebut, dan bekerjasama dengan aktor non-negara.

Dalam hal kerjasama internasional, 'konsep pengarusutamaan' akan disatukan pada awal tahun 2018 untuk membantu negara-negara mitra Swiss memenuhi SDG dengan cara yang lebih tepat di masa depan. Tetapi benar bahwa kontribusi Swiss akan diukur terhadap indikator yang terutama dipandu oleh langkah-langkah nasional.

Swiss telah mengabadikan pembangunan berkelanjutan dalam konstitusi sebagai tujuan mengikat semua tingkat pemerintahan. Strategi Pembangunan Berkelanjutan Dewan Federal menetapkan prioritas kebijakan menengah sampai jangka panjang di bidang ini. Strategi Pembangunan

Berkelanjutan menyediakan peta jalan untuk arah di mana Swiss harus terus berkembang di bidang-bidang utama tertentu.

Ini merupakan bagian dari proses perencanaan legislatif yang lebih luas. Versi revisi untuk periode 2016-2019 diadopsi pada tanggal 27 Januari 2016. Strategi tersebut merupakan skenario target untuk pembangunan berkelanjutan dan terdiri dari visi jangka panjang dan serangkaian sasaran untuk tahun 2030.

Agenda 2030 menyediakan kerangka acuan untuk Strategi Pembangunan Berkelanjutan yang baru. Memang, Strategi sudah mencakup banyak persyaratan SDG. Dalam jangka panjang, tujuannya adalah untuk mengarahkan Strategi semaksimal mungkin ke Agenda 2030.

Dra. Hj. Siti Masrifah, MA., Ingin mengetahui bagaimana Peran dan komitmen Swiss di Dunia Internasional untuk pencapaian SDGs ?



Dra. Hj. Siti Masrifah, MA., menyampaikan pertanyaan kepada Michael Gerber, *Swiss Special Envoy for Global Sustainable Development* (Utusan Khusus SDGs Swiss)

Swiss telah sejak awal berkomitmen untuk mengembangkan Agenda 2030, dan juga telah membantu menentukan isinya. Ini secara aktif terlibat dalam penyusunan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mekanisme untuk menindaklanjuti dan meninjau kemajuan. Salah satu keprihatinan Swiss adalah bahwa Sasaran baru harus mencerminkan keseimbangan aspek pembangunan berkelanjutan, sosial dan lingkungan, dan mempertimbangkan bagaimana Sasaran yang berbeda berinteraksi satu sama lain. Dalam negosiasi, Swiss bekerja sangat keras untuk memastikan tercapainya tujuan individu mengenai kesehatan, kesetaraan gender, air,

perdamaian dan masyarakat inklusif. Hal itu juga vokal dalam mendukung aspek-aspek seperti konsumsi dan produksi berkelanjutan, pengurangan risiko bencana dan peran migrasi dalam pembangunan berkelanjutan yang harus disertakan secara menonjol dalam Agenda 2030.

Tahun 2018 Swiss akan mempresentasikan laporan pelaksanaan komprehensif pertamanya di PBB di New York. Kami akan mengilustrasikan hasil proses peninjauan Swiss dan prioritas kami untuk melaksanakan Agenda 2030. Presentasi ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan contoh kemitraan dan kegiatan dari semua sektor masyarakat Swiss. Laporan negara ini disatukan di tingkat federal dengan melibatkan banyak kantor federal dan kelompok penasihat non-pemerintah. Dewan Federal akan membuat keputusan atas laporan tersebut pada musim semi 2018



Penyerahan Cindera mata Delegasi DPR RI dengan Michael Gerber,
Swiss Special Envoy for Global Sustainable Development (Utusan Khusus SDGs Swiss)
di Bern, Swiss

IV. Pertemuan Delegasi DPR RI dengan *Centre for Development and Environment (CDE)*, tanggal 21 November 2017

Tentang CDE

Centre for Development and Environment (CDE) adalah pusat keunggulan (*centre of excellence*) untuk pembangunan berkelanjutan. Ia merupakan salah satu pusat riset Universitas Bern yang strategis dengan tugas mengarusutamakan keberlanjutan melakukan pengajaran dan riset kampus.

CDE melakukan riset dan pengajaran untuk dunia yang lebih berkelanjutan. Dalam Strategi 2016-2021, CDE menawarkan cetak biru untuk sains yang transformatif dan terlibat dalam kebijakan. CDE mengkombinasikan pendekatan interdisipliner untuk analisis dan transformasi. Agenda riset terwujud dengan kemitraan yang tersebar di Utara dan Selatan.

Saat ini CDE memiliki mandat untuk memajukan riset, pengajaran, dan pelaksanaan bidang pembangunan berkelanjutan dan perubahan global. CDE mempekerjakan lebih dari 100 orang dari 17 disiplin ilmu, terlibat di lima kawasan di Selatan dan juga di Swiss dan Eropa. Saat ini melaksanakan 50 proyek dengan biaya CHF 15 juta. CDE juga menawarkan pendidikan di pembangunan berkelanjutan dan perubahan global di tingkat sarjana, master, doktoral dan level post-graduate.

CDE mengelola aktivitas dengan fokus nasional dan regional di sekitar 40 negara. Kawasan kunci adalah Afrika Timur, Tanduk Afrika, daratan Asia Tenggara, Andes tengah, dan Asia Tengah.

Kluster studi mereka adalah:

- Kluster sumber daya tanah, yang melihat penggunaan sumber daya alam seperti tanah, air dan tumbuhan. CDE meneliti peran tanah (akses, distribusi, hak) dan perubahan/adaptasi atas pengelolaannya (teknologi panen, konservasi, komodifikasi) dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
- Kluster transisi sosial-ekonomi, meneliti bagaimana pembangunan global menciptakan disparitas dan bagaimana disparitas membentuk pembangunan. CDE mengolah instrument untuk mengkaji kemiskinan dan ketimpangan dan mengidentifikasi jalur pembangunan alternatif yang memungkinkan dari inovasi sosial dan teknologi di area perumahan, produksi dan konsumsi.
- Kluster tata kelola berkelanjutan, menspesifikasi dalam interaksi antara sistem pengaturan global dan lokal. CDE menggunakan metode sains informasi geografis untuk mengidentifikasi dan memproyeksikan beragam klaim atas air, tanah dan makanan. CDE mendukung pembuat kebijakan dengan memfasilitasi proses pengambilan kebijakan yang partisipatif publik.

- Kluster pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, fokus pada membangun kapasitas manusia untuk menginisiasi transformasi ke arah pembangunan berkelanjutan. CDE mendukung Universitas Bern dalam mengarusutamakan keberkelanjutan melalui pengajaran, riset dan kegiatan.

Kemitraan internasional CDE

CDE juga membangun kemitraan dengan Pemerintah Swiss melalui *advisory group* (Group Penasihat). CDE diwakili oleh Prof. Dr. Peter Messerli, yang juga menjabat sebagai Direktur CDE. Selain CDE, mewakili kalangan sains ada juga wakil dari ETH Zurich. *Advisory Group* juga diisi kalangan masyarakat sipil, pebisnis dan kaum muda.

CDE melalui Prof Peter Messerli juga akan bekerjasama dengan mantan Deputy Bappenas untuk sumber daya alam dan lingkungan, Endah Murniningtyas untuk memimpin (*co-chair*) 15 ilmuwan dan pakar penting untuk menyusun *Global Sustainable Development Report*. Dokumen itu dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan panduan dari perspektif keilmuan yang akan mendukung pelaksanaan SDGs dan 2030 Agenda dengan cara mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial. Dokumen akan terbuka untuk para pemangku kepentingan termasuk bisnis, masyarakat sipil dan publik secara umum. Tim ini dibentuk oleh mantan Sekjen PBB Bann Kii Moon dan akan didukung oleh Sekretariat PBB, UNESCO, UNEP, UNDP, UNCTAD dan Bank Dunia

JALANNYA PERTEMUAN

Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc., berterima kasih atas kesediaan *Centre for Development and Environment (CDE)* Universitas Bern menerima kehadiran kami, dalam menjalin sebuah pertemuan dengan kelompok ilmuwan, akademisi dari Swiss untuk berdialog dan berdiskusi mengenai isu-isu pembangunan berkelanjutan khususnya SDGs.

Kunjungan kami ke CDE kali ini adalah sebuah kunjungan yang bersifat spesifik untuk mendalami beragam isu-isu terkait SDGs. Ini mungkin juga dapat dianggap sebagai pertemuan saintifik, mengingat kami ingin mengetahui lebih jauh—meskipun tidak terlalu teknis—bagaimana isu pembangunan berkelanjutan dan SDGs sebagai sebuah agenda global yang disepakati sejak 2015 dapat berkontribusi untuk dunia yang lebih baik.

Salah satu fokus Panja pada tahun ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai upaya mengatasi ketimpangan (*inequality*) dan juga terkait upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Swiss, dengan segala perkembangan pembangunan manusianya (*Very High Human Development*) dan juga Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang tinggi (lima besar negara terbersih versi Transparansi Internasional) sedikit banyak memenuhi kriteria fokus kami.

Kami ingin mendengar lebih banyak dari CDE bagaimana perspektif anda, secara keilmuan dan akademik, atas upaya global mencapai SDGs. Kami juga ingin berdiskusi panjang lebar terkait isu-isu khususnya sosial-ekonomi, yang tentu sangat erat hubungannya dengan ketimpangan. Semoga diskusi kali ini dapat produktif dan bermanfaat bagi kedua pihak.



Pertemuan antara Delegasi BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Centre for Development and Environment (CDE) di Bern, Swiss

Urs Wiesmann, *President of Centre for Development and Environment (CDE) Board* menyambut kunjungan Delegasi BKSAP DPR RI untuk SDGs. Urs Wiesmann juga menyatakan bahwa dunia sedang mencoba merealisasi kerangka pembangunan global. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan jelas dikatakan bahwa parlemen mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan global dengan peran legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Pada tahun 2016, CDE menjalankan kegiatan dengan fokus regional atau regional di 46 negara di seluruh dunia, wilayah utama adalah Afrika Timur, tanduk Afrika, daratan Asia Tenggara (terutama Laos dan Myanmar) Andes Tengah, dan Asia Tengah, banyak proyek dan program ini. mewakili pertunangan jangka panjang.

Di Swiss, CDE telah dibangun dan diperkuat bersama dengan mitra internasional selama bertahun-tahun, contohnya termasuk jaringan WOCAT (*world overview of conversation approach and technologies*), yang mempromosikan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan di seluruh dunia, dan matriks tanah, sebuah inisiatif global untuk meningkatkan transpraktabilitas transaksi transnasional tanah. Pada 2016, kami meningkatkan investasi kami dalam prakarsa berkelanjutan global, terutama platform penelitian bumi masa depan untuk keberlanjutan global dan jaringan pengetahuannya yang saat ini sedang dibangun. Pada bulan September 2016, CDE menjadi tuan rumah proyek proyek Global land land proyek internasional, salah satu proyek inti Bumi di masa depan dan jaringan penelitian terbesar dalam ilmu sistem pertanahan. CDE lebih lanjut terlibat dalam inisiatif internasional untuk mendukung pelaksanaan Agenda 2030



Urs Wiesmann sedang menjelaskan tentang peran dan kegiatan *Centre for Development and Environment (CDE)*

Heri Gunawan menanyakan kepada CDE bagaimana perspektif anda, secara keilmuan dan akademik, atas upaya global mencapai SDGs, dan isu-isu khususnya sosial-ekonomi, yang tentu sangat erat hubungannya dengan ketimpangan



Heri Gunawan menyampaikan pertanyaan kepada Centre for Development and Environment (CDE)

Thomas Breu , Director of *Centre for Development and Environment (CDE)* menyatakan pada titik manakah kita mengonfirmasikan "succses" ketika 75 persen dari tujuan tercapai? Beberapa tujuan lebih penting daripada yang lain, jawabannya tergantung pada apa dan bagaimana kita mengukur sesuatu. hanya perubahan terukur yang termasuk dalam perhitungan.

CDE telah menguji berbagai alat ukur dan berusaha untuk memperluas repertoar indikator kami. kondisi tertentu dari kemiskinan, eksploitasi, ketidaksetaraan, dan degradasi sumber daya - namun juga tekanan untuk mengkonsumsi dan tingkat limbah - biasanya hilang ganjil. Kami mempertimbangkan hal ini, paling tidak untuk Swiss, yang menghadapi banyak tantangan di SDG.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dapat diterapkan secara universal. Dengan mengadopsinya, semua negara telah sepakat untuk bekerja sama untuk mencapai SDG pada tahun 2030, dengan masing-masing negara memberikan kontribusi yang masuk akal untuk pelaksanaannya di tingkat nasional dan internasional.

Umat manusia menghadapi tantangan berat - migrasi, perubahan iklim, degradasi lingkungan, kemiskinan dan kelaparan, untuk menyebutkan beberapa. di dunia global kita. masalah ini tidak bisa dipecahkan oleh masing-masing negara. Oleh karena itu masyarakat Internasional telah membentuk sebuah kerangka untuk mempromosikan solusi bersama: agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Inti dari kesepakatan internasional ini adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menetapkan tonggak sejarah sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat dicapai di seluruh dunia pada tahun 2030. Konvensi ini berlaku untuk semua negara, termasuk Swiss.

Swiss sangat berkomitmen untuk mengembangkan Agenda 2030 dan membantu menentukan isinya. Secara aktif terlibat dalam penyusunan SDG dan Mengembangkan mekanisme untuk menindaklanjuti, dan meninjau kemajuan. Untuk tujuan ini, ia terlibat dalam dialog yang luas dengan perwakilan dari bisnis, akademisi, masyarakat sipil, politik, administrasi dan publik.

PBB memperkirakan bahwa investasi global sebesar US \$ 5-7 per tahun diperlukan untuk mewujudkan SDGs. jumlah tersebut hanya dapat dimobilisasi jika donor publik dan swasta mengkoordinasikan usaha mereka dalam teknologi ramah lingkungan.

Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc. ingin mengetahui sejauh mana Strategi CDE berkontribusi dalam mengimplementasikan SDG?



Dwi Ria Latifah, SH, M.Sc., menyampaikan pertanyaan kepada *Centre for Development and Environment (CDE)*

Thomas Breu , Director of *Centre for Development and Environment (CDE)* menyatakan Sebagai pusat universitas, kita berada dalam posisi istimewa tapi juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi. kami ingin menyebutkan dua contoh bagaimana kita memicu proses transformatif sesuai dengan strategi kita

- 1) Jalan menuju pembangunan berkelanjutan diaspal dengan trade-off. kita berada dalam posisi untuk membuat kekuatan pengetahuan berdasarkan bukti ilmiah - bekerja untuk kita dan untuk pasangan kita. para pemangku kepentingan diberdayakan untuk mewakili kepentingan mereka dalam menghadapi konflik ini, dan dengan demikian mengekspresikan visi keberlanjutan mereka sendiri,
- 2) Salah satu tugas inti CDE adalah mengajar. Kami mengajarkan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah proses kreatif. Tugas kita melampaui transfer pengetahuan. Disiplin lain akan mengklaim tujuan yang sama. Intinya, ini adalah cita-cita pendidikan dasar dari pencerahan. Siswa kami adalah "agen perubahan" potensial yang menjadi dasar persiapan kami



Thomas Breu , Director of *Centre for Development and Environment (CDE)* sedang menjelaskan kepada Delegasi DPR RI

Pendekatan CDE terhadap pembangunan berkelanjutan menekankan negosiasi visi klaim dan keberlanjutan di antara beragam aktor dari tingkat lokal sampai global. Kami menganggap keadilan sebagai kompas normatif kunci dalam usaha, dan pemahaman sistematis tentang proses sosial-ekologis sebagai dasarnya. Baru-baru ini proses politik yang berkaitan

dengan negosiasi pembangunan telah menjadi lebih inklusif dan lebih demokratis di banyak tempat, memperluas cakupan integrasi bukti ilmiah. namun pengetahuan yang dicari untuk negosiasi keputusan yang objektif dan adil terdiri dari lebih dari deskripsi, prediksi, dan skenario proses sistematis.

Semakin banyak aktor mencari jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana perubahan yang diinginkan dapat dicapai, jenis perubahan apa yang mungkin memiliki kekuatan untuk memicu transformasi transformator yang lebih luas menuju pembangunan berkelanjutan, dan efek tambahan apa yang dimaksudkan atau tidak diinginkan - sebuah perubahan mungkin terjadi. Upaya tingkat global saat ini untuk melaksanakan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan menghadapi pertanyaan ini dengan tepat.

Implementasi Swiss

Dewan federal bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mencapai tujuan agenda 2030. Ini berusaha untuk melakukannya dalam kemitraan dengan kanton, komune, bisnis, masyarakat sipil dan akademisi. Dalam prakteknya, ini berarti mengambil langkah untuk mengurangi emisi CO₂, mempromosikan kesetaraan gender dan siklus bahan yang dekat, misalnya. Namun, ini juga tentang menciptakan kondisi, di mana investasi publik dan swasta dapat secara efektif mendorong pembangunan berkelanjutan.

Selain upaya di rumah, Swiss juga bekerja untuk melaksanakan Agenda 2030 melalui kerja sama luar negeri dan pengembangan luar negerinya, misalnya dengan menyediakan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia untuk mendukung negara-negara miskin.

Sebagai bagian dari mekanisme peninjauan internasional, negara harus melapor kepada PBB mengenai kemajuan mereka dalam mengimplementasikan SDG. laporan negara ini juga memungkinkan pemerintah untuk menjaga agar warga negara dan parlemen mereka tetap up to date. Swiss berencana untuk mengadopsi siklus pelaporan empat tahun, dengan jadwal laporan negara pertamanya untuk musim panas 2018. Di masa depan Swiss akan menyelaraskan kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan SDGs. Laporan negara juga akan menjadi dasar Strategi Pembangunan Berkelanjutan. Dewan Federal merevisi strategi ini setiap empat tahun, dengan revisi berikutnya dimulai pada awal 2020

Dewan federal telah memutuskan untuk mengawasi pelaksanaan agenda 2030. Prosesnya dipimpin oleh kantor federal untuk pengembangan Spasial (ARE) dan Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Langkah pertama akan diambil pada musim semi 2018 dan sedang dikelompokkan oleh kelompok kerja antardepartemen

- * Tinjauan mendalam akan memastikan status terkini dari implementasi Agenda 2030, baik secara nasional maupun internasional, survei ini akan menjelaskan di mana sebagian besar tindakan diperlukan untuk mencapai SDG. Ini juga akan mengidentifikasi peluang bagi Swiss yang muncul dari Agenda 2030
- * Dengan maksud untuk melaksanakan Agenda 2030, pengaturan kelembagaan akan disiapkan untuk memastikan bahwa pekerjaan dikelola secara efisien di tingkat federal. sinergi dalam koordinasi antara proses nasional dan internasional akan semakin dimanfaatkan dan duplikasi usaha yang dihindari.
- * Pemerintah Federal akan memperluas sistem pemantauan Pembangunan Berkelanjutan (MONET) untuk memungkinkan pemantauan terus menerus terhadap kemajuan menuju tujuan

Hasil karya ini akan menjadi dasar laporan pertama Swiss untuk PBB pada 2018



Penyerahan Cendera mata Ketua Delegasi DPR RI dengan Ketua CDE
(The Centre for Development and Environment) di Bern

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kunjungan kerja ke Konfederasi Swiss berlangsung lancar dan sukses. Beragam praktik cerdas, pengetahuan, dan pengalaman berharga didapat saat kunjungan Kerja Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan BKSAP DPR RI ke Konfederasi Swiss. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kunjungan kerja adalah sebagai berikut:

1. Parlemen adalah pemangku kepentingan yang dapat menginisiasi sejumlah aturan dan regulasi lintas sektor demi tercapainya tujuan dan indikator yang terdapat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Tantangan Pengembangan dan Respons SECO dalam kerjasama dengan Indonesia adalah untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia yang sejahtera. tujuan utamanya adalah mencapai definisi dan pemahaman pemerintah Indonesia tentang prioritas sebagaimana didefinisikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN 2015-2019)
3. Tindakan mendesak masih diperlukan di berbagai bidang, seperti mengurangi ketidaksetaraan, kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesetaraan jender, dan penggunaan sumber daya alam. Selain itu, konflik politik di berbagai belahan dunia menghambat pembangunan berkelanjutan, dan mendesaknya mengambil tindakan melawan perubahan iklim. Di sisi lain, pengalaman menunjukkan bahwa memerlukan beberapa tahun sebelum mulai melihat hasil dari penerapan norma dan sasaran global SDG.

Saran

Atas kunjungan kerja ke Konfederasi Swiss, Delegasi BKSAP DPR RI untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merumuskan saran-saran sebagai berikut:

- 1) BKSAP DPR RI mendorong Pemerintah RI untuk terus menjalin kerja sama dengan dengan Pemerintah Swiss dalam upaya Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan Swiss
- 2) BKSAP merekomendasikan kepada Pemerintah RI untuk mensinergikan antara RPJMN serta RPJMD dan visi Presiden yang terangkum dalam Nawacita dalam pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di dalam negeri.

- 3) Untuk kepentingan pencapaian SDGs yang inklusif, BKSAP merekomendasikan kepada Pemerintah RI untuk membuat skala prioritas implementasi SDGs disertai oleh alur waktu (*timeline*) yang terukur.
- 4) Mengingat pentingnya implementasi SDGs, Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memerlukan penguatan kewenangan sebagai penjuru parlemen dalam pengawasan implementasi SDGs di lapangan.
- 5) BKSAP DPR RI perlu mendesak Pemerintah RI untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, parlemen, NGO, pelaku bisnis, dan civitas akademika. Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam kesuksesan implementasi SDGs diperlukan untuk menjalankan prinsip *no one left behind*.

a.n. Ketua Delegasi

Dwi Ria Latifa, SH, M.Sc.
A-143

Laporan kerja Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke Georgia 2-8 Desember 2017



**LAPORAN DELEGASI
BKSAP DPR RI KE GEORGIA
2 S.D 8 DESEMBER 2017**

Pengantar

Dalam merespons agenda tujuan pembangunan berkelanjutan yang berdimensi global, BKSAP DPR RI mengadakan inisiatif dalam pengarusutamaan SDGs di dalam negeri dan juga dalam forum parlemen internasional. Sebagai bagian dari usaha pengarusutamaan SDGs di dalam negeri, BKSAP aktif menggalang kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah dan LSO. BKSAP berdiskusi aktif dengan Kementerian Luar Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai penjurus SDGs Pemerintah Indonesia dan INFID sebagai perwakilan NGO. BKSAP juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara dan kabupaten / kota untuk mengumpulkan informasi langsung mengenai upaya nyata untuk mewujudkan kesadaran akan SDG dan kolaborasi antara Pemerintah dan Parlemen.

BKSAP DPR RI memperhatikan bahwa kerja sama dan kolaborasi antar negara sangat penting untuk membuat kemajuan di SDG di tingkat global. Dalam mempertimbangkan pentingnya kerjasama dan kolaborasi tersebut, BKSAP DPR RI melakukan misi kunjungan kenegaraan untuk mendapatkan keunggulan komparatif dari negara-negara tertentu dalam mengimplementasikan SDG.

Dengan latar belakang ini, BKSAP DPR RI melakukan studi banding ke Georgia dalam mengeksplorasi SDG terkait dengan pelaksanaan SDG dalam konteks nasional, termasuk keberhasilan pelaksanaan dan tantangan di tingkat nasional sejauh mana Georgia telah menerapkan reformasi SDGs di tingkat lokal dan nasional.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kunjungan kerja BKSAP ke Georgia adalah:

- 1) Kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Georgia adalah untuk mendapatkan informasi dari tangan pertama terkait pelaksanaan SDGs di Georgia.
- 2) Kunjungan kerja BKSAP adalah juga untuk mengeksplorasi lebih jauh kebijakan dan strategi Georgia dalam mendorong pelaksanaan SDG yang berpusat pada masyarakat.
- 3) Kunjungan kerja BKSAP untuk mengeksplorasi mekanisme kemitraan internasional yang dibangun Georgia untuk pembangunan berkelanjutan.
- 4) Kunjungan kerja BKSAP DPR RI untuk mencari lebih banyak serta elaborasi mekanisme parlemen untuk SDG di tingkat nasional dan regional.

Delegasi

Delegasi BKSAP DPR RI yang mengikuti kunjungan kerja ke Georgia adalah:

1. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, Ketua BKSAP, Fraksi Partai Demokrat, Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.
2. H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi, MS, Fraksi PPP, Komisi I yang membidangi pertahanan, hubungan luar negeri, dan informasi.
3. DR. EVITA NURSANTY, M.SC, Fraksi PDIP, Komisi I yang membidangi pertahanan, hubungan luar negeri, dan informasi.
4. Dra. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, Fraksi PDIP, Komisi X yang membidangi Pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, seni, dan kebudayaan.
5. IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, Fraksi PDIP, Komisi X yang membidangi Pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, seni, dan kebudayaan.
6. H. FIRMANDEZ, Fraksi Partai Golkar, Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.
7. VENNA MELINDA, Fraksi Partai Demokrat, Komisi X yang membidangi Pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, seni, dan kebudayaan.
8. LUCKY HAKIM, Fraksi PAN, Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.
9. DRA. HJ. SITI MASRIFAH, MA, Fraksi PKB, Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan.
10. Dr. H. JAZULI JUWAINI, Lc., MA, Fraksi PKS, Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.
11. Hj. NURHAYATI, Fraksi PPP, Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.
12. AMELIA ANGGRAINI, Fraksi Partai Nasdem, Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan.

**Pertemuan dengan Mr. Zaza Khutsishvili, First Deputy Chairman of
Environmental Protection and Natural Resources Committee
Tbilisi, 4 Desember 2017**



Mr. Zaza Khutsishvili mengawali sambutan selamat datang kepada delegasi BKSAP DPR RI di Kompleks Parlemen Georgia, Tbilisi. Pihaknya mengakui mendapat kehormatan dengan kunjungan delegasi DPR RI. Kini Parlemen Georgia tengah mengembangkan model rekonsiliasi antara kebijakan ekonomi dan lingkungan.

Sebagai pembuka paparan, Zaza menguraikan bahwa Georgia meraih kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1990. Berbagai model bentuk pemerintahan telah dijalani oleh Georgia. Sejak tahun 1998, Georgia menganut sistem pemerintahan parlementer di mana parlemen berfungsi sebagai tempat pembentukan pemerintah. Dalam konteks kedatangan BKSAP ke Georgia, ia menjelaskan bahwa parlemen Georgia tentu saja sangat aktif terlibat dalam implementasi SDGs di dalam negeri. Menurut Zaza, tantangan terbesar dalam implementasi SDGs di Georgia adalah perdamaian mengingat bahwa ada wilayah Georgia yang masih diduduki Rusia.

Dalam konteks ekonomi kawasan, Georgia tengah menggenjot pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan percepatan investasi. Selain itu, ekspor barang dalam negeri diarahkan ke negara-negara Eropa dan Tiongkok. Mengingat Georgia tengah mengajukan diri sebagai anggota baru Uni Eropa, segala bentuk perjanjian semisal Free Trade Agreement tengah dirampungkan dengan Uni Eropa.

Dalam konteks SDGs, Georgia membidik dua segmen, yakni perdamaian dan stabilitas serta ekonomi. Segmen perdamaian dan stabilitas terkait dengan wilayah Georgia yang masih diduduki serta segmen ekonomi terutama terkait

manfaat yang didapatkan Georgia dari integrasi dengan Uni Eropa. Lebih jauh, menurut data Bank Dunia Georgia secara konsisten mengalami pertumbuhan ekonomi di atas empat persen. Pasca merdeka, Georgia menganut ekonomi pasar yang mendukung pembangunan di dalam negeri.

Secara fungsi keparlemenan, Parlemen Georgia bertransformasi menjadi fungsi strategis pengawasan dan penyusunan peraturan strategis. Parlemen Georgia membentuk 15 komite.

Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Georgia menyadari bahwa sumber daya alam tidak memadai dalam menopang pembangunan. Georgia mencari penanggulangan dengan cara membentuk sistem pendidikan yang terintegrasi dengan industri, inovasi model teknologi modern, menggalakkan sektor pariwisata, dan mencari investor. Guna mengatasi kekosongan sumber daya alam, Georgia mengembangkan energi bersih dan terbarukan seperti sungai, geologi, hidrologi untuk menopang pembangunan sekaligus untuk meminimalisasi penggunaan energi minyak bumi.

Dr. Nurhayati Ali Assegaf dalam sambutannya menyampaikan bahwa dunia perlu mempelajari kegagalan dalam pelaksanaan MDGs sebelumnya. SDGs adalah agenda global yang ambisius untuk diimplementasikan selama 15 tahun ke depan. Tidak sama dengan penyusunan MDGs yang top-down, SDGs bersifat bottom-up karena penyusunannya melibatkan banyak pemangku kepentingan mulai dari ahli, pemerintah, parlemen, dan LSM.

Mengingat pentingnya agenda global tersebut, DPR RI membentuk Panitia Kerja SDGs untuk mengawal sekaligus mengarusutamakan SDGs di Indonesia. Peran parlemen penting karena di lembaga legislatif ini legislasi, pengawasan, dan anggaran menentukan TPB.

Ia menyebut contoh ketika implementasi MDGs, Panja MDGs aktif dalam proses penggaran untuk masalah kesehatan. Alhasil pencapaian nasional Indonesia sukses dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan. Dalam forum-forum internasional, Panja juga diundang untuk melakukan presentasi di sidang PBB. Ia mewakili DPR RI mengegolkan tentang peran parlemen dalam implementasi SDGs di negara masing-masing.

Amelia Anggraini mengadakan diskusi pasal Parlemen Georgia mengadopsi Open Government Partnership (OGP) on SDGs. Ia juga ingin mengadakan sharing dan mendengar soal 3 fungsi utama parlemen yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan terutama terkait upaya Komite Lingkungan Parlemen Georgia dalam memetakan proteksi terhadap lingkungan.

Venna Melinda mengemukakan bagaimana Komite Lingkungan Parlemen Georgia mengukur target anggaran air bersih, sanitasi, dan infrastruktur pemerintah Georgia yang mencapai USD 2,30 triliun dan anggaran konstruksi yang mencapai USD 1,7 triliun. Lantas bagaimana langkah-langkah Georgia dalam meningkatkan kualitas energi bersih?

Nurhayati Monoarfa menjelaskan bahwa efek rumah kaca berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Ia ingin mengetahui komitmen rencana aksi Georgia terutama mengenai kebijakan strategis penurunan efek rumah kaca, mitigasi dan adaptasi. Selain itu, ia ingin mengetahui legislasi proteksi lingkungan yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Mr. Zaza Khutsishvili merangkum semua pertanyaan dengan memulai Open Government Partnership (OGP) adalah langkah awal keterbukaan Parlemen Georgia dalam (1) mendengar aspirasi publik via livestreaming, (2) public broadcaster. Di samping itu, secara daring masyarakat Georgia dapat menyampaikan kepada Parlemen Georgia, berupa (1) legal draft, (2) opini, (3) sistem pemilihan umum, (4) debat publik.

Untuk air bersih, Georgia merencanakan untuk mengimplementasikan di dalam negeri selama tiga tahun. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mineral, sistem filter air, area pedesaan. Yang menjadi persoalan sejak tahun 1990-an, adalah adopsi rencana pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi dan isu lingkungan yang menyertainya. Oleh karena itu, pemangku kepentingan Georgia melihat aturan yang dibuat di negaranya mengadopsi jalan tengah antara pengelolaan ekonomi dan proteksi lingkungan.

**Pertemuan dengan Mr. Roman Kakulia, Chairman of the Sector
Economy and Economic Policy Committee
Tbilisi, 4 Desember 2017**



Pertemuan diawali dengan saling perkenalan delegasi Panja SDGs BKSAP DPR RI dengan Komite Sektor Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Parlemen Georgia. Delegasi BKSAP dipimpin oleh Dr. Nurhayati Ali Assegaf, sementara Komite Sektor Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Parlemen Georgia dipimpin oleh ketuanya Mr. Roman Kakulia.

Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan amat penting bagi pembangunan dunia. Termasuk peran penting parlemen amat penting dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan SDGs di tingkat negara masing-masing. Menyadari hal penting tersebut, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan kepada mitranya bahwa BKSAP DPR RI membentuk Panitia Kerja SDGs untuk mengarusutamakan SDGs di Indonesia. DPR RI baru saja mengelat pertemuan parlemen se-dunia yang bertajuk World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Bali.

Menurut pernyataan Nurhayati Ali Assegaf, Forum Parlemen Dunia tersebut mengadopsi Deklarasi Bali. Deklarasi tersebut meminta semua pihak untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan merata (tidak meninggalkan siapa pun di belakang), untuk mengakhiri kekerasan dan untuk mempertahankan perdamaian, dan meningkatkan tindakan iklim. Komitmen DPR RI mendapat sambutan luas di komunitas internasional terbukti forum tersebut dihadiri 40 parlemen negara-negara sahabat, 17 perwakilan negara-negara sahabat, dan 11 peninjau serta 28 pembicara yang datang dari mancanegara. Menurutnya, peran dan partisipasi Parlemen Georgia akan dinantikan dalam Forum Parlemen Dunia yang akan dihelat BKSAP DPR RI. Ia juga meminta kepada Parlemen Georgia untuk menghadiri Parlemen Dunia yang menurut rencana kembali akan diadakan di Bali pada tahun 2018.

Dalam penjelasannya, Mr. Roman Kakulia menjelaskan bahwa terdapat masalah mendasar dalam pelaksanaan SDGs di Georgia. Beberapa masalah tersebut adalah: tenaga kerja, korupsi dan transparansi, perdagangan bebas, ekonomi pasar, pendudukan teritori, inflasi, dan lingkungan bisnis.

Menurut keterangan Mr. Roman Kakulia, Georgia mencanangkan dua target dasar dalam pencapaian SDGs yakni: (1) penciptaan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk bisnis. Sementara target (2) adalah infrastruktur yang terhubung dan mendukung pariwisata Georgia. Dalam melaksanakan target pertama dan kedua ini, Georgia menyadari sepenuhnya bahwa perekonomian dan bisnis membutuhkan kebijakan lintas-sektoral. Georgia tengah mengembangkan aturan hukum, lingkungan bisnis kondusif, sistem kompetitif, SDM, dan pengembangan energi.

Dalam mengejar target dasar di atas, Georgia terus menjalin dan mengembangkan perdagangan bebas utamanya dengan Turki, Tiongkok, dan Uni Eropa. Georgia juga memberikan insentif bisnis pada para pelaku usaha guna menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, infrastruktur yang dibangun di Georgia menggunakan standar Eropa.

Beberapa perkembangan dan isu SDGs terkini di kedua negara yang dibahas antara BKSAP DPR RI dan Komite Sektor Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Parlemen Georgia adalah sebagai berikut:

Terkait pembebasan visa bagi turis Indonesia dan Georgia, ia berpendapat bahwa pembebasan visa akan berdampak pada peningkatan pariwisata dan akan membuka pendapatan bagi rakyat kedua negara. Namun, dalam masalah ini memerlukan pembahasan untuk merevisi aturan di Georgia termasuk alasan dan argumentasinya. Dirinya tidak memiliki wewenang dalam masalah pembebasan visa.

Terkait dengan solusi pertanian, Roman Kakulia menyebut bahwa sektor tersebut sebetulnya menyumbang terhadap pengentasan kemiskinan namun Georgia belum sukses dalam menerapkannya sehingga perlu mencari cara dan kerja sama dengan negara lain guna meraih potensial dalam mendatangkan pendapatan rakyat.

Dalam pada itu, Georgia tengah mengembangkan suatu inisiatif baru yakni membangun dan memperbanyak *rural industries* guna mengatasi kesenjangan antara kota dan desa. Inisiatif ini guna meningkatkan dan pemeratakan pendapatan penduduk yang tersebar di pedesaan.

Prinsip dasar Georgia dalam membangun kebijakan ekonomi adalah kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang beresonansi terhadap kehidupan sosial. Georgia juga menerapkan kebijakan ekonomi yang tidak bertentangan dengan ekonomi pasar.

**Pertemuan dengan Ms. Sophie Katsarava, Chairperson of the
Committee of Foreign Affairs of the Parliament of Georgia
Tbilisi, 4 Desember 2017**



Delegasi BKSAP yang dipimpin Dr. Nurhayati Ali Assegaf diterima oleh Ms. Sophie Katsarava Ketua Komite Luar Negeri Parlemen Georgia. Dalam sambutannya, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa dalam pelaksanaan SDGs, parlemen adalah salah satu pemangku kepentingan yang penting dan harus mengambil inisiatif dalam memberikan perspektif parlemen kolektif untuk membuat pelaksanaannya lebih efektif dan bermakna. Selain itu, parlemen memainkan peran penting dalam melaksanakan SDG karena undang-undang, pengawasan, dan penganggarannya. Ia mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memulai proses awal untuk mengarusutamakan SDGs jauh sebelum SDGs diadopsi secara resmi pada bulan September 2015. Pada bulan Januari 2015, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), sebuah alat kelengkapan DPR RI membentuk Panitia Kerja tentang SDGs untuk menyiapkan dan mengarusutamakan kerja SDG di Parlemen. Oleh karena itu, Panja ini melanjutkan pekerjaan dari Kelompok Kerja sebelumnya tentang MDGs di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya ia menegaskan bahwa peran parlemen dalam memandu proses pembuatan kebijakan dan membangun konsensus tentang berbagai masalah memang sangat penting. DPR RI telah memantau kinerja Pemerintah berkaitan dengan SDGs secara berkelanjutan. DPR RI melengkapi pekerjaan Pemerintah dalam mencapai SDGs dengan tidak hanya mengadakan dengar pendapat dan debat reguler di DPR tetapi juga dengan mengorganisir forum parlemen dunia pertama tentang Pembangunan Berkelanjutan tentang isu-isu SDGs untuk bertukar ide, informasi, dan praktik terbaik di seluruh dunia yang berlangsung di Bali.

Singkatnya, dengan fungsi BKSAP untuk melakukan fungsi diplomasi parlemen dari DPR RI, Panitia Kerja SDGs berfungsi sebagai cara untuk terlibat dengan para aktor internasional dan untuk mempelajari praktik-praktik terbaik dalam implementasi SDGs dari negara-negara lain di seluruh dunia.

Dalam hal pengembangan lembaga yang kuat (Tujuan 16) khususnya di Parlemen, Dr. Nurhayati Ali Assegaf lebih lanjut mengakui bahwa Parlemen Georgia telah mengadopsi Deklarasi OGP tentang Pemerintahan Terbuka untuk Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Menurutnya, sangatlah luar biasa bahwa Parlemen Georgia adalah cabang legislatif pertama di dunia yang mendukung deklarasi OGP yang disebutkan di atas.

Dalam kunjungan kerja ini, BKSAP DPR RI ingin mencari pengetahuan lebih lanjut dan praktik terbaik dari Parlemen Georgia dalam mendukung penerapan SDG dengan mengadopsi, sebagaimana disebutkan di atas, Deklarasi OGP tentang Pemerintahan Terbuka untuk Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Apa yang dilakukan oleh Parlemen Georgia menunjukkan kepada kita bahwa Parlemen Georgia telah berhasil melaksanakan tugas legislatif melalui perspektif pembangunan berkelanjutan.

Ketua Komite Luar Negeri Parlemen Georgia Ms. Sophie Katsarava menyambut selamat datang delegasi BKSAP DPR RI ke gedung Parlemen Georgia. Menurut Ms. Sophie Katsarava, dalam hal pengembangan institusi yang kuat (Goal 16) khususnya di Parlemen, Georgia telah mengadopsi Deklarasi OGP tentang Pemerintahan Terbuka untuk Pelaksanaan Agenda 2030 untuk Pembangunan berkelanjutan (*the OGP Declaration on Open Government for Implementation of the 2030 Agenda for sustainable Development*). Ia menambahkan bahwa deklarasi ini mencatatkan Parlemen Georgia sebagai cabang legislatif pertama di dunia yang telah menyetujui deklarasi OGP tersebut di atas.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Parlemen Georgia telah mengadopsi sebuah Rencana Aksi untuk memastikan keterbukaan di Parlemen, transparansi informasi parlementer, dan memfasilitasi keterlibatan warga negara dalam proses parlementer dan legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip Kemitraan Pemerintahan Terbuka (*Open Government Partnership/ OGP*). Prinsip OGP ini adalah sebuah langkah untuk keterbukaan karena prinsip OGP ini memungkinkan warga Georgia untuk mengomentari rancangan undang-undang dan undang-undang yang baru akan diadopsi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Parlemen Georgia juga telah membentuk Dewan Parlemen Permanen mengenai Pemerintahan Terbuka dan Transparan (*the Permanent Parliamentary Council on Open and Transparent Governance*) yang mencakup anggota dari perwakilan masyarakat sipil dan juga parlemen.

Ia juga menambahkan terkait dengan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan (beririsan dengan SDG 6, 7, 11, 13, 14, dan 15), Georgia mengadopsi Second National Environmental Action Plan atau lebih dikenal dengan NEAP-2 (2012-2016). Rencana aksi ini memperlihatkan tipe pembangunan nasional yang membangun rekonsiliasi antara pembangunan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan.

NEAP-2 menetapkan sasaran jangka panjang, target jangka pendek dan menyediakan kegiatan masing-masing untuk sebelas tema: Bencana (mencakup bencana alam dan buatan manusia, kecelakaan industri), Perubahan Iklim, Limbah dan zat kimia, Keselamatan Nuklir dan Radiasi, Sumber Daya Air, suhu udara, Laut Hitam, Keanekaragaman Hayati dan Lahan Lindung, Sumberdaya Lahan, Kehutanan, Sumber Daya Mineral. NEAP-2 juga menyajikan beberapa isu lintas sektoral dan diakhiri dengan penjelasan tentang pentingnya koordinasi kebijakan di dalam pemerintah nasional, antara tingkat nasional dan kota.

**Pertemuan dengan Mr. Solomon Pavliashvili, First Deputy Minister
of Environment and Natural Resources Protection of Georgia
Tbilisi, 5 Desember 2017**



Dalam sambutannya, Ketua Panitia Kerja SDGs BKSAP DPR RI Dr. Nurhayati Ali Assegaf mengapresiasi Kementerian Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Georgia atas keramahannya dalam menerima BKSAP DPR RI. Ia memulai dengan deskripsi bahwa pada Pertemuan Pembangunan Berkelanjutan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (the United Nations Sustainable Development Summit on 25 September 2015) pada 25 September 2015, para pemimpin dunia mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan. Untuk menerjemahkan peran perwakilan parlemen dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah membentuk Panitia Kerja SDG di bawah Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP. Panja SDGs telah dibentuk untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan tantangan dan peluang penerapan SDGs di Indonesia. Melalui Panja ini, BKSAP juga secara aktif melakukan mekanisme pemantauan terhadap implementasi SDGs.

Panja SDGs bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai praktik baik di dalam negeri maupun dari komunitas internasional. Kunjungan kerja kami ke Kementerian Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Georgia hari ini dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif Pemerintah Georgia dalam memperkuat upaya untuk mengendalikan kebijakan terhadap lingkungan. BKSAP ingin bertukar pandangan lebih lanjut tentang implementasi Perjanjian Paris.

Salah satu tugas terpenting Kementerian Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Georgia adalah mendukung pembangunan berkelanjutan negara di bidang lingkungan hidup; mengatur sistem perencanaan lingkungan; untuk menguraikan dan menerapkan kebijakan negara, program sasaran, strategi perlindungan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan, program aksi lingkungan nasional dan rencana pengelolaan di bidang perlindungan lingkungan dan sumber daya alam; untuk melindungi dan memelihara lanskap dan ekosistem yang unik, spesies flora dan fauna langka dan langka yang menjadi ciri khas negara, keanekaragaman hayati, sumber udara, air, darat dan mineral di atmosfer; menerapkan administrasi publik (peraturan, registrasi, pengawasan dan pengendalian) pengelolaan limbah dan bahan kimia; untuk mengikuti undang-undang Georgia di bidang perlindungan lingkungan dan untuk menerapkan komitmen internasional sesuai kompetensinya. Selain itu Kementerian Lingkungan juga bertugas mengorganisir adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.

Kementerian Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Georgia membawahi enam badan hukum:

- Agency of Protected Areas
- National Environmental Agency
- National Forestry Agency
- Basic Sapling Forestry
- Environmental Information and Education Center
- Nuclear and Radiation Safety Agency

Dia menyadari kehutanan adalah masa depan dunia, dan ini menjadi masalah krusial di Georgia. Dalam mengimplementasikan SDGs terkait sekali dengan integrasi Georgia dalam keanggotaan Uni Eropa. Georgia menyadari bahwa kesuksesan implementasi SDGs di lapangan terletak di tataran aturan legislasi dan kemitraan internasional.

Sumber energi Georgia mengandalkan pada minyak dan gas bumi, pertambangan, dan keanekaragaman hayati. Georgia bertekad mengkombinasikan antara eksplorasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Terkait dengan perubahan iklim, **Mr. Solomon Pavliashvili** mengakui bahwa tahun 2015 Paris Agreement merupakan langkah maju dalam penanganan perubahan iklim berupa kewajiban bagi negara-negara penandatangan untuk mengurangi emisi sebesar 99 % hingga 2030. Menurutnya, 2017 adalah langkah nyata dan era baru dalam perubahan iklim. Sebesar 80 % listrik di Georgia dihasilkan dari tenaga hidro, ini untuk mengurangi pemanasan bumi dan meningkatkan energi terbarukan di Georgia demi kelestarian lingkungan.

Georgia mengembangkan *coal-waste management*. Implementasi pengerjaan proyek ini di bawah payung standar Uni Eropa. Georgia menyadari sepenuhnya bahwa penggunaan energi fosil tidak dapat dihindari karena masih menjadi energi yang strategis bagi pembangunan Georgia. Akan tetapi, Georgia berkomitmen menurunkan emisi pembuangan gas rumah kaca. Georgia mengembangkan industri yang mengedepankan komponen hijau yang kurang polusi dan ramah lingkungan serta bersih secara ekologis.

Georgia berkomitmen keseimbangan antara eksplorasi dan proteksi alam lingkungan sehingga investasi tidak merusak lingkungan akan tetapi menyediakan mitigasi terhadap kerugian lingkungan. Georgia mengembangkan proteksi terhadap keanekaragaman hayati mengingat Georgia mempunyai 88 hutan lindung dan taman nasional yang jumlahnya 1 juta hektar. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk melindungi spesies dan konservasi lingkungan.

Dalam konteks itulah, SDGs ditampilkan sebagai sentral kebijakan ekonomi dan lingkungan untuk generasi masa depan. Prinsip-prinsip SDGs digunakan untuk infrastruktur, tenaga air, dan pembangunan ramah lingkungan.

Biaya SDGs di Georgia patut mendapat catatan di sini. Pembiayaan SDGs di Georgia dikembangkan menjadi institusi finansial yang modern dan kuat. Dan pembiayaan berasal dari investor asing sehingga turut mengembangkan foreign

development index Georgia. Misalnya Georgia menyederhanakan layanan bisnis bagi investor untuk membangun iklim berusaha yang kompetitif di Georgia. Investasi ini dibiayai oleh Bank of China. Bundesbank Jerman berinvestasi selama 10 tahun mendanai pembangkit tenaga listrik tenaga air.

**Pertemuan dengan Ms. Irma Kavtaradze, Minister the Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Tbilisi, 5 Desember 2017**



Nurhayati Ali Assegaf dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam demokrasi perwakilan, parlemen memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengendalikan pemerintah. Parlemen memiliki kekuatan untuk membuat dan mengubah undang-undang, meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan apa pun, menyetujui uang untuk mengatur negara, dan memperdebatkan masalah kepentingan nasional dan internasional. Oleh karena itu, parlemen, sebagai lembaga legislatif yang sah di negara itu, memegang peran penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dengan memberlakukan undang-undang yang relevan dan memantau secara ketat pelaksanaan berbagai program dan inisiatif.

BKSAP DPR RI menyadari pentingnya peran parlemen dalam pelaksanaan SDGs oleh karena itu, dalam skala internasional, BKSAP DPR RI berjuang dalam sidang-sidang internasional memperjuangkan isu-isu yang terkait dengan SDGs. Pada Juli 2017 silam, dalam kapasitas saya sebagai Ketua BKSAP menghadiri UN High Level Political Forum yang merupakan sidang tinjauan sukarela tahunan yang diadakan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (UN ECOSOC) di Markas PBB, New York, AS. Dalam forum tingkat tinggi tersebut, DPR RI mengemukakan gagasan berbagai cara untuk mendorong keterlibatan parlemen lebih lanjut di dalam pelaksanaan SDGs secara nasional maupun internasional.

Untuk mewujudkan komitmen di atas, BKSAP DPR RI menyelenggarakan untuk pertama kalinya forum parlemen untuk Pembangunan Berkelanjutan mengenai isu-isu SDG (World Parliamentary Forum on Sustainable Development/ WPFSD) untuk bertukar gagasan, informasi, dan praktik terbaik di seluruh dunia yang berlangsung di Bali tahun 2017 yang lalu. Forum Dunia tersebut mengadopsi Deklarasi Bali. Deklarasi tersebut meminta semua pihak untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan merata (tidak meninggalkan siapa pun di belakang), untuk mengakhiri kekerasan dan untuk mempertahankan perdamaian, dan meningkatkan tindakan iklim. Alhamdulillah komitmen DPR RI mendapat sambutan luas di komunitas internasional terbukti forum tersebut dihadiri 40 parlemen negara-negara sahabat, 17 perwakilan negara-negara sahabat, dan 11 peninjau serta 28 pembicara yang datang dari mancanegara.

Irma Kavtaradze mengatakan Georgia mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tanpa kompromi. Georgia dalam melaksanakan SDGs melancarkan program agenda reformasi berupa penciptaan iklim bisnis kondusif dan kebebasan dalam berusaha.

Georgia, seperti terbaca dalam Voluntary National Report 2016, berkomitmen melaksanakan SDGs dengan cara: (1) memprioritaskan integrasi kebijakan ekonomi, (2) lokalisasi SDGs, dan (3) nasionalisasi SDGs di tingkat nasional. Administration of Government Georgia ditunjuk sebagai penjurur (*focal-point*) Pemerintah Georgia. Di dalamnya terdapat struktur National SDGs Commission. Unit ini merupakan inter-governmental agency. Kementerian Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan adalah hasil fusi dari beberapa kementerian dan lembaga, seperti: Kementerian Olahraga, HAM, buruh, dan pertanian. Fusi ini diharapkan dapat meningkatkan performa kementerian dalam meningkatkan perekonomian dan bisnis Georgia.

Kementerian Perekonomian Georgia menetapkan lima tujuan, yaitu: (1) gender equality, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) industri berkelanjutan, (4) menurunkan kesenjangan, (5) transportasi dan infrastruktur.

Kementerian Perekonomian saat ini membuat kelompok kerja yang aktif mengkaji inklusi sosial, pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan perlindungan terhadap HAM.

Pendidikan adalah prioritas dasar yang menjadi landasan pelaksanaan SDGs di Georgia. Oleh karena itu, Pemerintah Georgia gencar meningkatkan profesionalisme guru dengan memberikan semacam kualifikasi terhadap guru-guru di Georgia. Pemerintah Georgia juga meningkatkan mutu pendidikan tinggi guna menerapkan riset-riset strategis guna mewujudkan pembangunan berbasis inovasi. Salah satu yang penting digarispawahi dalam bidang pendidikan ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian lingkungan Hidup bekerja sama dalam membuat dan menerapkan pendidikan SDGs di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi Georgia.

Dalam pembangunan transportasi dan infrastruktur, Pemerintah Georgia mengembangkan teknologi modern. Salah satu inisiasi Georgia adalah mengadakan One Belt-One Road Forum dengan menghadirkan 60 negara untuk membahas infrastruktur yang menghubungkan kawasan. Dalam implementasi di lapangan, Pemerintah Georgia tengah mengembangkan pembangunan mega-proyek kereta cepat Baku-Tbilisi-Turki. Pemerintah Georgia menggandeng China Uruchi dalam mendanai mega proyek tersebut.

Transportasi di Georgia sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Belanja Negara. Pemerintah Pusat bertanggung jawab terhadap pembiayaan infrastruktur dan transportasi di wilayah dan daerah Georgia.

Pemerintah Georgia juga mengadakan riset dan kunjungan kerja (*working visit*) ke Jerman dalam rangka memaksimalkan implementasi SDGs di lapangan.

Dalam pendanaan SDGs, yang patut dicatat dari Georgia adalah keseriusan dalam membiayai implementasi SDGs. Pendanaan adalah faktor penting kesuksesan SDGs di lapangan. Oleh karena itu, Pemerintah Georgia aktif dalam mendapatkan dana bantuan internasional (*international aid*) dari lembaga donor, di antaranya: USAID, US Agency, dan UNDP.

Penutup

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari kunjungan kerja BKSAP ke Georgia adalah sebagai berikut:

- 1) Kunjungan kerja ke Georgia berlangsung sukses dengan pertemuan antara delegasi BKSAP dengan Komite Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Parlemen Georgia, Komite Sektor Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Parlemen Georgia, Kementerian Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Georgia, Kementerian Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan Georgia.
- 2) Georgia mengembangkan konsep pembangunan ramah lingkungan dengan penggunaan sumber daya alam yang ramah lingkungan
- 3) Parlemen Georgia telah mengadopsi sebuah Rencana Aksi (*the OGP Declaration on Open Government for Implementation of the 2030 Agenda for sustainable Development*) untuk memastikan keterbukaan di Parlemen, transparansi informasi parlementer, dan memfasilitasi keterlibatan warga negara dalam proses parlementer dan legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip Kemitraan Pemerintahan Terbuka (*Open Government Partnership/ OGP*).
- 4) Prinsip OGP ini memungkinkan warga Georgia untuk mengomentari rancangan undang-undang dan undang-undang yang baru diadopsi.
- 5) Dari pertemuan dengan tiga Komite (Komite Lingkungan, Komite Ekonomi, dan Komite Hubungan Luar Negeri) Parlemen Georgia, dengan diadopsinya Deklarasi OGP tentang Pemerintahan Terbuka untuk Pelaksanaan Agenda 2030 untuk Pembangunan berkelanjutan (*the OGP Declaration on Open Government for Implementation of the 2030 Agenda for sustainable Development*) terdapat upaya Parlemen Georgia dalam pengembangan institusi yang kuat (Goal 16) khususnya di Parlemen.
- 6) Deklarasi ini mencatatkan Parlemen Georgia sebagai cabang legislatif pertama di dunia yang telah menyetujui deklarasi OGP tersebut di atas.
- 7) Pemerintah Georgia dalam upaya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan telah mencanangkan kebijakan rekonsiliasi pembangunan dan perlindungan lingkungan.
- 8) Georgia mempunyai keanekaragaman hayati serta area hutan lindung yang sangat banyak. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya rekonsiliasi pembangunan ekonomi sekaligus merawat ekosistem lingkungan.
- 9) Berkenaan dengan energi terbarukan (goal 7), pembangunan Georgia juga diarahkan untuk menjaga dan merawat khazanah kekayaan hayati serta lingkungan ekosistem. Upaya yang kini sedang digenjut adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga hidro di banyak tempat. Tujuan jangka panjang adalah elektrifikasi menggunakan tenaga hidro sehingga mengurangi penggunaan batu bara dan minyak bumi.
- 10) Yang menarik adalah pembiayaan SDGs. Pemerintah Georgia dalam pembiayaan SDGs mendapat pendanaan dari lembaga donor seperti USAID, lembaga PBB seperti UNDP, serta bantuan Pemerintah Jerman.

Saran

- 1) Hasil-hasil kunjungan kerja BKSAP ke Georgia menjadi penting untuk dikomunikasikan ke lembaga pemerintah terkait semisal Kementerian Luar Negeri dan Bappennas selaku penjurur (*focal-point*) SDGs Pemerintah Indonesia. Hasil-hasil kunjungan kerja ke Georgia dapat menjadi pembandingan dengan pelaksanaan SDGs di Indonesia
- 2) Hasil-hasil kunjungan kerja BKSAP mengenai SDGs juga dapat dikomunikasikan dengan komisi-komisi terkait yang ada di DPR RI. Terutama *the OGP Declaration on Open Government for Implementation of the 2030 Agenda for sustainable Development* yang dicanangkan Parlemen Georgia dapat menjadi pertimbangan bagi DPR RI untuk model pengarusutamaan SDGs di tingkat parlemen.
- 3) Hasil-hasil kunjungan kerja BKSAP ke Georgia dapat dilakukan diseminasi secara luas agar diketahui publik. Diseminasi dapat menjadi wacana pembandingan antara Indonesia dan Georgia.
- 4) Dalam upaya pembiayaan SDGs, Pemerintah Georgia banyak memanfaatkan bantuan donor dari negara atau lembaga asing. Berkaca dari hal tersebut, Pemerintah RI dapat mengefektifkan pendanaan dengan skema penggalangan donor luar negeri. Pembiayaan ini (tercakup dalam SDG goal 17) sangat menentukan kesuksesan implementasi SDGs di lapangan.

**Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta 10270

Tel. +6221 575834 Fax. +6221 57321132

Email : biro.ksap@dpr.go.id